

**Dari Ruang Digital ke Ruang Publik:  
Representasi Kemarahan Publik dalam Podcast Bocor Alus Politik**  
*From Digital Space to Public Sphere:  
Representations of Public Anger in the Bocor Alus Politik Podcast*

**Muh. Medriansyah Putra Kartika<sup>1</sup>, Muhammad Ihlusul Amal<sup>2</sup>,  
dan Eka Kurnia Syawaliyah Subagio<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum  
Universitas Sulawesi Barat, Prof. Dr. Baharuddin Lopa, S.H, Kabupaten Majene,  
Sulawesi Barat 91412, Indonesia

<sup>2</sup>Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan  
Sastra Indonesia, Universitas Negeri Makassar, Kampus Parangtambung, Jalan Malengkeri Raya,  
Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 90222, Indonesia

<sup>3</sup>Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Halu Oleo,  
Kampus Bumi Tridharma Anduonohu, Jalan H.E.A. Mokodompit, Kota Kendari,  
Sulawesi Tenggara, 93232, Indonesia

Korespondensi: [muh.medriansyahputrakartika@unsulbar.ac.id](mailto:muh.medriansyahputrakartika@unsulbar.ac.id)

**Abstract**

*This study analyzes how the Bocor Alus Politik podcast represents public anger towards power in the digital sphere and its transformation into broader public discourse. Using Robert Entman's framing analysis approach, this research examines the episode titled "Public Anger Towards Power" broadcast on August 30, 2025. The research employs qualitative content analysis methods on podcast transcripts and audience responses in digital public spaces. The findings reveal that the podcast frames public anger through four main elements: (1) problem definition positioning the issue as elite arrogance and disconnection from people's aspirations, demonstrated through data on DPR allowance increases reaching 658 million rupiah per month; (2) causal interpretation linking the problem to the political oligarchy system and systematic elite behavior; (3) moral evaluation legitimizing public anger as a necessary democratic response; and (4) treatment recommendations encouraging continuous public oversight and protection of demonstration rights. The podcast functions as a counter-public sphere offering alternative narratives different from mainstream media framing. Audience resonance is evident through comments adopting similar framing and using mobilization hashtags such as #ResetIndonesia. This research contributes to understanding podcast roles in Indonesian political discourse, particularly in transforming anger from digital spaces into collective public expressions and strengthening participatory democracy.*

**Keywords:** framing analysis; podcast; public sphere; political communication; public anger

**Abstrak**

Penelitian ini menganalisis bagaimana podcast Bocor Alus Politik merepresentasikan kemarahan publik terhadap kekuasaan di ruang digital dan transformasinya ke wacana publik yang lebih luas. Menggunakan analisis framing Robert Entman, penelitian mengkaji episode "Kemarahan Publik terhadap Kekuasaan" yang disiarkan 30 Agustus 2025. Metode analisis konten kualitatif diterapkan pada transkrip podcast dan respons audiens di ruang publik digital. Temuan mengungkapkan podcast membingkai kemarahan melalui empat elemen: (1) pendefinisian masalah sebagai arogansi elite dan pemutusan aspirasi rakyat, terbukti dari data kenaikan tunjangan DPR 658 juta rupiah per bulan; (2) interpretasi kausal pada sistem oligarki politik dan perilaku elite sistematis; (3) evaluasi moral melegitimasi kemarahan sebagai respons demokratis yang diperlukan; dan (4) rekomendasi pengawasan publik berkelanjutan dan perlindungan hak berdemonstrasi. Podcast berfungsi sebagai counter-public sphere dengan narasi alternatif berbeda dari framing media mainstream. Resonansi audiens terlihat melalui komentar yang mengadopsi framing serupa dan menggunakan hashtag mobilisasi seperti #ResetIndonesia. Penelitian berkontribusi pada pemahaman peran podcast dalam wacana politik Indonesia, khususnya mentransformasi kemarahan digital menjadi ekspresi publik kolektif dan memperkuat demokrasi partisipatif.

**Kata Kunci:** analisis framing; podcast; ruang publik; komunikasi politik; kemarahan publik

## PENDAHULUAN

Transformasi media di era digital telah mengubah secara fundamental lanskap komunikasi politik di Indonesia. Kemunculan *podcast* (siniar) sebagai medium baru memberikan ruang alternatif bagi diskusi politik yang berbeda dari media *mainstream* ( arus utama) tradisional. *Podcast* politik tidak hanya menjadi platform konsumsi informasi pasif, tetapi juga arena aktif untuk pembentukan opini publik, konstruksi wacana politik, dan bahkan mobilisasi politik. Fenomena ini menarik untuk dikaji secara akademis, terutama dalam konteks bagaimana *podcast* merepresentasikan isu-isu politik kontemporer yang sensitif dan bagaimana representasi tersebut berkontribusi pada transformasi diskusi dari ruang digital yang terbatas ke ruang publik yang lebih luas dan inklusif. Perkembangan teknologi komunikasi dan media digital telah membuka peluang baru bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam diskursus politik, melampaui batasan-batasan yang selama ini ada dalam media tradisional (Benkler, 2006; Castells, 2015; McCombs & Valenzuela, 2021).

Perkembangan *podcast* di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan laporan We Are Social yang dikutip Annur (2024), pada Januari 2024 tercatat sebanyak 38,2% pengguna internet di Indonesia yang mendengarkan *podcast* setidaknya sepekan sekali. Angka ini terus meningkat, dan pada Oktober 2024 hingga 40,6% pengguna internet yang rutin mendengarkan *podcast* setiap minggu, sebagaimana dilaporkan Data Reportal dan dikutip Muhamad (2024). Peningkatan tersebut terjadi dalam rentang kurang dari satu tahun ini mencerminkan laju pertumbuhan konsumsi *podcast* Indonesia yang sangat cepat. Rata-rata durasi mendengarkan *podcast* pengguna internet Indonesia pun tergolong tinggi, yakni 56 menit per hari, melampaui rata-rata global sebesar 49 menit per hari. Di sisi produksi, data Spotify yang dikutip Angelica (2025) menunjukkan bahwa jumlah produksi *podcast* di Indonesia meningkat lebih dari 12 kali lipat dalam lima tahun terakhir, mencerminkan pertumbuhan ekosistem *podcast*

yang pesat baik dari sisi konsumsi maupun produksi konten. Berbeda dengan media tradisional yang terikat pada struktur editorial formal dan regulasi yang ketat, *podcast* menawarkan fleksibilitas dalam format, durasi, dan gaya penyampaian yang lebih santai namun tetap informatif dan analitis. Karakteristik ini membuat *podcast* menjadi medium yang efektif untuk komunikasi politik yang lebih mendalam dan engaged, memungkinkan eksplorasi isu-isu kompleks dengan cara yang tidak selalu tersedia dalam berita televisi yang dibatasi waktu atau artikel koran yang dibatasi ruang. Kemudahan akses melalui platform digital seperti Spotify, Apple Podcasts, dan YouTube juga berkontribusi pada popularitas *podcast* sebagai medium informasi politik (Newman dkk., 2021; Swart dkk., 2019).

Salah satu *podcast* politik terkemuka di Indonesia adalah Bocor Alus Politik yang diproduksi oleh Tempo, salah satu media berita paling kredibel di Indonesia. *Podcast* ini dikenal karena gaya penyampaiannya yang kritis, investigatif, dan mendalam dalam membahas berbagai isu politik aktual. Format percakapan antara tiga jurnalis senior Tempo, yakni Raymond Dusrikang, Husein Abri Dongoran, dan Daniel Ahmad Fajri, menciptakan dinamika diskusi yang natural dan *engaging*, seolah-olah audiens diundang untuk ikut dalam obrolan informal namun berbobot di antara para jurnalis berpengalaman. *Podcast* ini secara konsisten mengangkat isu-isu yang sensitif dan kontroversial, memberikan analisis yang tajam, dan sering kali mengungkap informasi hasil investigasi yang tidak tersedia di media lain. Kredibilitas Tempo sebagai institusi media dan pengalaman para *host* memberikan legitimasi pada narasi yang dikonstruksi dalam *podcast* ini (Eriyanto, 2018; Littlejohn dkk., 2017).

Indonesia mengalami gelombang demonstrasi besar-besaran pada Agustus 2025 yang dipicu oleh kemarahan publik terhadap kenaikan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di tengah situasi ekonomi yang sulit dialami oleh masyarakat luas. Demonstrasi yang mencapai puncaknya pada tanggal 25 Agustus 2025 menjadi salah satu aksi massa terbesar dalam beberapa tahun terakhir, dengan

ribuan orang dari berbagai elemen masyarakat turun ke jalan menuntut pembubaran DPR. Kemarahan publik ini tidak muncul dalam vakum, melainkan merupakan akumulasi dari berbagai kebijakan dan perilaku DPR yang dianggap arogan dan tidak pro-rakyat, termasuk legislasi yang kontroversial seperti Undang-Undang Cipta Kerja dan revisi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), skandal korupsi yang terus berulang, hingga kenaikan tunjangan yang dianggap tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi rakyat. Demonstrasi ini mencerminkan ketidakpercayaan masyarakat yang semakin dalam terhadap institusi legislatif dan elite politik secara umum (Mietzner, 2020).

Dalam konteks fenomena sosial-politik yang kompleks ini, Bocor Alus Politik merilis episode berjudul “Kemarahan Publik terhadap Kekuasaan” pada 30 Agustus 2025, lima hari setelah demonstrasi besar tersebut. Episode dengan durasi 32 menit 34 detik ini secara komprehensif menganalisis fenomena demonstrasi, mengungkap latar belakang kenaikan tunjangan DPR, menyajikan data investigatif tentang pendapatan sebenarnya anggota DPR, mengeksplorasi kemungkinan orkestrasi politik di balik demonstrasi, dan mendiskusikan implikasi politik jangka panjang dari kemarahan publik ini. *Podcast* ini menjadi salah satu referensi penting bagi publik yang ingin memahami konteks yang lebih dalam dari demonstrasi, melampaui *coverage* berita harian yang seringkali fragmentaris. Episode ini viral di media sosial dan memicu diskusi luas di berbagai platform digital, menunjukkan bagaimana *podcast* dapat berfungsi sebagai *agenda setter* dalam diskursus politik digital (Tandoc dkk., 2020).

Peran media massa dalam membentuk opini publik terhadap isu-isu sosial dan politik sangat krusial. Seperti yang dijelaskan oleh Kartika & Rahardjo, hlm. (2021, hlm. 75–76), media massa memiliki peran strategis dan sangat penting dalam pembentukan opini publik. Media massa memiliki kekuatan untuk mempengaruhi sikap masyarakat terhadap suatu isu tertentu. Selain itu, media massa juga bukan hanya menggambarkan suatu realitas dan menunjukkan sumber berita, tetapi juga dipandang sebagai agen konstruksi sosial yang

mendefinisikan realitas. Media ikut membentuk realitas yang disajikan dalam beritanya melalui berbagai macam instrumen yang dimiliki. Dalam konteks *podcast* politik, konstruksi realitas ini menjadi lebih kompleks karena format audio yang intimate dan percakapan yang lebih panjang memungkinkan elaborasi mendalam atas isu-isu yang dibahas, menciptakan apa yang disebut oleh beberapa peneliti sebagai “*deep engagement*” dengan audiens (Prior, 2019).

Dalam literatur komunikasi politik, konsep *public sphere* yang dikemukakan oleh Habermas (1989) menjadi kerangka penting untuk memahami ruang tempat wacana politik dibentuk dan dinegosiasikan. Habermas mendefinisikan *public sphere* sebagai arena dalam kehidupan sosial di mana individu dapat berkumpul untuk mendiskusikan secara bebas dan mengidentifikasi masalah-masalah sosial, dan melalui diskusi tersebut mempengaruhi tindakan politik. Dalam konsep ideal Habermas, *public sphere* adalah ruang yang inklusif, rasional, dan bebas dari dominasi kekuasaan ekonomi atau politik. Namun, kritik terhadap konsep Habermas, terutama dari (Fraser, 1990), menunjukkan bahwa dalam realitas, *public sphere* seringkali tidak inklusif dan didominasi oleh kelompok-kelompok tertentu, sehingga muncul kebutuhan akan *counter-public spheres* atau ruang publik alternatif bagi kelompok-kelompok yang termarginalkan dalam *public sphere* dominan.

Dalam konteks era digital, Benkler (2006) memperkenalkan konsep *networked public sphere* yang menjelaskan bagaimana teknologi digital dan internet telah mengubah karakteristik *public sphere* menjadi lebih terdesentralisasi, partisipatif, dan memungkinkan produksi informasi oleh individu atau kelompok kecil tanpa harus melalui institusi media besar. Memperluas gagasan ini, Papacharissi (2002, 2010) mengembangkan konsep *digital public sphere* atau *virtual sphere* sebagai perpanjangan dari gagasan Habermas ke ranah internet, dengan berargumen bahwa ruang digital menyediakan infrastruktur bagi diskursus publik yang lebih terbuka dan partisipatif, meskipun juga menghadapi tantangan berupa fragmentasi audiens, ketimpangan akses, echo chambers,

polarisasi, dan dominasi kepentingan komersial. Dalam kerangka ini, *digital public sphere* versi Papacharissi bukan sekadar perpindahan forum diskusi ke platform daring, melainkan mencerminkan transformasi struktural dalam cara warga negara berpartisipasi dalam pembentukan opini publik dan pengawasan terhadap kekuasaan. Podcast seperti Bocor Alus Politik dapat dipahami sebagai manifestasi sekaligus dari *networked public sphere* maupun *digital public sphere* tersebut, yakni ruang alternatif tempat narasi-narasi kritis terhadap kekuasaan diartikulasikan, diperdebatkan, dan disebarluaskan melampaui batas-batas ruang publik konvensional, dengan biaya produksi yang relatif rendah namun mampu menjangkau audiens luas melalui platform digital (Castells, 2015).

*Framing analysis* menjadi pendekatan teoretis dan metodologis yang relevan untuk memahami bagaimana media mengkonstruksi realitas sosial dan politik. Entman (1993) mendefinisikan *framing* sebagai proses seleksi dan penekanan aspek-aspek tertentu dari realitas yang dirasakan, sehingga mempromosikan definisi masalah tertentu, interpretasi kausal, evaluasi moral, dan rekomendasi tindakan. Model *framing* Entman mengidentifikasi empat fungsi utama: *defining problems* (mendefinisikan masalah), *diagnosing causes* (mengidentifikasi penyebab), *making moral judgments* (memberikan penilaian moral), dan *suggesting remedies* (menawarkan solusi). Dalam konteks komunikasi politik, framing berperan sangat penting karena cara sebuah isu dibingkai dapat mempengaruhi bagaimana publik memahami isu tersebut, siapa yang mereka anggap bertanggung jawab, bagaimana mereka mengevaluasi secara moral, dan apa yang mereka anggap sebagai solusi yang tepat. Studi terkini menunjukkan bahwa pemberitaan kasus tertentu, seperti korupsi di Indonesia sering melampaui aspek hukum, mengaitkannya dengan dimensi politik, moral, dan legitimasi kekuasaan (Amal dkk., 2025).

Hal ini mengindikasikan bahwa media berfungsi tidak hanya sebagai saluran informasi tetapi juga sebagai aktor aktif dalam mengkonstruksi makna sosial dan politik.

Dalam studi mengenai *framing media online* terhadap kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) Immanuel Ebenezer, Amal dkk. (2025) menemukan bahwa media mengoperasikan *framing* sebagai mekanisme ideologis yang tidak hanya melaporkan peristiwa tetapi juga membangun kerangka interpretatif yang membimbing pemahaman publik tentang hubungan antara hukum, politik, dan moralitas dalam diskursus publik Indonesia. Hal ini juga sejalan dengan temuan Amal dkk. (2024) yang menunjukkan bahwa agenda media yang dibangun oleh media daring secara perlahan memengaruhi agenda publik dalam isu yang diberitakan. Temuan tersebut relevan untuk memahami bagaimana *podcast* politik, sebagai bagian dari ekosistem media digital, juga terlibat dalam proses konstruksi makna yang memiliki implikasi politik signifikan. Dalam era di mana batasan antara jurnalisme, aktivisme, dan hiburan semakin kabur, pemahaman tentang mekanisme *framing* menjadi semakin penting untuk literasi media kritis (Lecheler & de Vreese, 2018).

Meskipun terdapat banyak penelitian tentang *framing* dalam media berita tradisional dan media sosial, penelitian tentang *framing* dalam *podcast* politik, khususnya di Indonesia, masih sangat terbatas. Sebagian besar studi komunikasi politik di Indonesia berfokus pada media tradisional seperti televisi dan koran, atau pada media sosial seperti Twitter dan Facebook. *Podcast*, meskipun telah berkembang pesat sebagai medium konsumsi berita dan informasi, belum mendapat perhatian akademis yang memadai. Padahal, *podcast* memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari medium lain. Format audio memungkinkan audiens mendengarkan *podcast* sambil melakukan aktivitas lain (*multitasking*). Selain itu, format percakapan menciptakan kedekatan yang berpotensi membangun relasi parasosial. *Podcast* dengan durasi yang lebih panjang juga memungkinkan eksplorasi mendalam atas isu. Sementara itu, fleksibilitas editorial *podcast* juga lebih besar dibandingkan media tradisional yang lebih terstruktur dan terikat regulasi yang ketat (Prior, 2019).

Lebih jauh, penelitian tentang representasi kemarahan dalam media politik

juga masih jarang. Kemarahan, sebagai emosi politik, seringkali dianggap negatif atau irasional dalam wacana politik formal. Namun, dalam teori demokrasi deliberatif kontemporer, kemarahan mulai diakui sebagai *political emotion* yang sah dan bahkan diperlukan dalam kondisi tertentu, terutama sebagai respons terhadap ketidakadilan (Nussbaum, 2016). Bagaimana media merepresentasikan kemarahan publik, baik sebagai ancaman terhadap stabilitas atau sebagai ekspresi demokratis yang sah, memiliki implikasi penting terhadap legitimasi protes sosial dan partisipasi politik. Dalam konteks Indonesia di mana ruang untuk kritik terhadap pemerintah mengalami dinamika yang kompleks dalam beberapa tahun terakhir, studi tentang bagaimana media alternatif seperti *podcast* merepresentasikan kemarahan publik menjadi sangat relevan untuk memahami kesehatan demokrasi Indonesia.

Berdasarkan latar belakang dan gap penelitian yang telah diidentifikasi, artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana *podcast* Bocor Alus Politik merepresentasikan kemarahan publik terhadap kekuasaan serta bagaimana representasi tersebut berkontribusi pada transformasi wacana dari ruang digital ke ruang publik yang lebih luas. Dengan menggunakan kerangka framing Entman, penelitian ini menelaah penggunaan dan keterkaitan elemen-elemen framing dalam mengonstruksi narasi kemarahan publik, sekaligus mengkaji implikasinya terhadap diskusi publik, partisipasi politik, dan dinamika demokrasi di Indonesia.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis framing model Entman (1993) untuk menganalisis representasi kemarahan publik dalam *podcast* Bocor Alus Politik. Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin memahami secara mendalam bagaimana makna dikonstruksi dalam teks media, bukan untuk mengukur frekuensi atau korelasi antar variabel. *Framing analysis* Entman dipilih karena menyediakan kerangka

analisis yang sistematis dan komprehensif, dengan empat elemen yang jelas, yaitu *problem definition*, *causal interpretation*, *moral evaluation*, dan *treatment recommendation*. Keempat elemen tersebut memungkinkan dilakukannya identifikasi dan analisis terstruktur terhadap bagaimana isu dibingkai dalam *podcast*. Model ini telah terbukti efektif dalam menganalisis konstruksi makna dalam berbagai jenis media, termasuk media digital (Amal dkk., 2025; Lecheler & de Vreese, 2018).

Objek penelitian adalah episode *podcast* Bocor Alus Politik yang berjudul “Kemarahan Publik terhadap Kekuasaan” yang disiarkan pada tanggal 30 Agustus 2025. Episode ini dipilih dengan pertimbangan *purposive sampling* berdasarkan beberapa kriteria, yaitu:

1. episode ini secara eksplisit membahas fenomena kemarahan publik terhadap DPR yang menjadi fokus penelitian,
2. episode ini dirilis tidak lama setelah demonstrasi besar 25 Agustus 2025, sehingga merepresentasikan respons langsung terhadap peristiwa aktual dan dinamika wacana politik yang sedang berkembang
3. episode ini memiliki durasi yang relatif panjang (32 menit 34 detik), memungkinkan analisis mendalam dengan data yang komprehensif, dan
4. episode ini mendapat respons audiens yang signifikan, terlihat dari jumlah tayangan dan komentar di berbagai platform, menunjukkan relevansi dan dampaknya dalam diskursus publik.

Sementara itu, *podcast* Bocor Alus Politik dipilih sebagai kasus karena beberapa alasan strategis, yaitu:

1. *podcast* ini diproduksi oleh Tempo, media yang memiliki reputasi kuat dalam jurnalisme investigatif, sehingga memiliki legitimasi dan kredibilitas tinggi di Indonesia,
2. Bocor Alus Politik dikenal sebagai kanal yang bersikap kritis terhadap kekuasaan dan secara konsisten mengangkat isu-isu sensitif, menjadikannya representatif dari *podcast* politik alternatif di luar media arus utama yang cenderung lebih konservatif, dan

3. *podcast* ini mengusung format percakapan tiga *host*, yaitu Raymond Dusrikang, Husein Abri Dongoran, dan Daniel Ahmad Fajri yang merupakan jurnalis senior dengan pengalaman luas dalam peliputan politik, sehingga diskusi yang dihadirkan memiliki kedalaman analitis dan kredibilitas yang kuat.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dua tahap utama. Tahap pertama adalah dokumentasi audio *podcast*. File audio episode “Kemarahan Publik terhadap Kekuasaan” diunduh dari platform Spotify untuk memastikan kualitas audio yang optimal dan menghindari degradasi kualitas dari *streaming*. Audio kemudian ditranskrip secara verbatim menggunakan kombinasi *automatic transcription tools* (untuk draf awal) dan *manual transcription* (untuk verifikasi dan koreksi). Transkrip verbatim sangat penting untuk analisis *framing* karena memungkinkan identifikasi kata-kata, frasa, dan ekspresi spesifik yang digunakan oleh *host*, yang merupakan elemen kunci dalam konstruksi *framing*. Transkrip mencakup penanda *speaker* (Raymond, Husein, Daniel) untuk memungkinkan analisis dinamika percakapan dan kontribusi masing-masing *host* dalam konstruksi *framing*. Proses transkripsi juga memperhatikan elemen paralinguistik seperti penekanan kata, jeda, dan intonasi yang dapat memberikan petunjuk tentang *framing* emosional.

Tahap kedua adalah observasi respons audiens di ruang publik digital. Data komentar pendengar dikumpulkan dari kolom komentar episode *podcast* di platform Spotify. Periode pengumpulan komentar adalah dari tanggal publikasi episode pada 30 Agustus 2025 hingga Januari 2026, memberikan waktu yang cukup untuk mengidentifikasi berbagai respons dan diskusi yang muncul. Komentar-komentar ini penting untuk menganalisis resonansi *framing*, apakah *framing* yang dikonstruksi *podcast* diadopsi oleh audiens, bagaimana audiens merespons dan menginterpretasi *framing* tersebut, dan apakah *framing* memicu diskusi atau tindakan lebih lanjut. Analisis komentar juga memperhatikan penggunaan *hashtag*, bahasa, dan narasi yang menunjukkan adopsi atau penolakan terhadap *framing podcast*.

Teknik analisis data mengikuti tahapan analisis *framing* yang sistematis. Tahap pertama adalah familiarisasi dengan data, di mana peneliti membaca transkrip *podcast* secara berulang (minimal tiga kali) sambil mendengarkan audio untuk memahami konteks, nuansa, dan alur narasi secara keseluruhan. Tahap kedua adalah identifikasi dan segmentasi, yaitu memecah transkrip menjadi segmen-segmen narasi berdasarkan topik atau subtopik yang dibahas. Setiap segmen diberi kode dan label untuk memudahkan referensi dan analisis. Tahap ketiga adalah *coding* berdasarkan empat elemen *framing* Entman. Setiap segmen narasi ditelaah untuk mengidentifikasi apakah dan bagaimana ia berkontribusi pada:

1. *problem definition*, bagaimana masalah didefinisikan, aspek apa yang ditonjolkan sebagai masalah;
2. *causal interpretation*, siapa atau apa yang diidentifikasi sebagai penyebab masalah, faktor apa yang dianggap bertanggung jawab;
3. *moral evaluation*, penilaian moral apa yang diberikan terhadap aktor atau situasi, bahasa evaluatif apa yang digunakan; dan
4. *treatment recommendation*, solusi atau tindakan apa yang disarankan, baik secara eksplisit maupun implisit.

Tahap keempat adalah analisis dan interpretasi mendalam untuk setiap elemen *framing*. Untuk setiap elemen, peneliti mengidentifikasi pola, konsistensi, dan variasi dalam bagaimana elemen tersebut dikonstruksi sepanjang episode. Misalnya, apakah *problem definition* tetap konsisten atau berkembang selama percakapan? Apakah ada *multiple causal interpretations* yang ditawarkan dan bagaimana mereka dihubungkan? Bahasa dan retorika apa yang digunakan untuk moral evaluation dan bagaimana ia berfungsi untuk melegitimasi atau mendelegitimasi aktor tertentu? Analisis juga memperhatikan elemen-elemen tambahan seperti penggunaan data dan fakta, kutipan dari sumber atau narasumber, penggunaan analogi atau metafora, *tone* (nada) dan emosi yang diungkapkan oleh *host*, dan

penggunaan humor atau ironi sebagai strategi retorik.

Tahap kelima adalah analisis resonansi dan transformasi ke ruang publik. Komentar audiens dianalisis untuk melihat apakah dan bagaimana mereka mengadopsi, memodifikasi, atau menolak *framing* yang dikonstruksi *podcast*. Analisis juga melihat apakah komentar menunjukkan tanda-tanda mobilisasi atau tindakan politik, seperti penggunaan *hashtag* aktivisme (#ResetIndonesia), ekspresi niat untuk berpartisipasi dalam aksi, atau diskusi tentang strategi politik. Tahap keenam adalah triangulasi dan validasi. Temuan dari analisis *framing* di-*cross-check* dengan konteks peristiwa politik aktual yang terjadi pada periode tersebut, termasuk berita media *mainstream*, pernyataan resmi dari DPR atau pemerintah, dan data-data faktual tentang kenaikan tunjangan. Triangulasi ini penting untuk memvalidasi interpretasi dan memastikan analisis tidak bias atau spekulatif.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah segmen narasi dalam *podcast*. Segmen narasi didefinisikan sebagai bagian percakapan yang memiliki kohesi tematik, biasanya berkisar antara beberapa kalimat hingga beberapa paragraf transkrip. Satu segmen dapat mengandung kontribusi dari satu atau lebih *host*. Pemilihan segmen sebagai unit analisis (bukan kalimat atau episode keseluruhan) memberikan *balance* antara *granularity* yang cukup untuk analisis mendalam dan konteks yang cukup untuk memahami makna. Penelitian juga mempertimbangkan konteks produksi dan konteks sosio-politik sebagai bagian dari analisis. Konteks produksi mencakup informasi tentang Bocor Alus Politik sebagai produk Tempo, karakteristik dan latar belakang ketiga *host*, serta positioning *podcast* dalam lanskap media Indonesia. Konteks sosio-politik mencakup situasi politik Indonesia pada Agustus 2025, sejarah hubungan antara masyarakat sipil dengan DPR, pola demonstrasi dan aktivisme di Indonesia, serta dinamika kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat sipil. Pemahaman terhadap konteks ini menjadi krusial untuk menghasilkan interpretasi yang bernuansa, sekaligus menghindari analisis yang terlepas dari konteks atau terlalu tekstual, yang berpotensi

mengabaikan realitas sosial dan politik tempat teks tersebut diproduksi dan diterima.

Beberapa keterbatasan metodologis perlu diakui untuk menjaga transparansi dan integritas penelitian. Pertama, penelitian ini fokus pada satu episode dari satu *podcast*, sehingga temuan mungkin tidak dapat digeneralisasi ke *podcast* lain atau episode lain dari Bocor Alus Politik sendiri. Namun, fokus ini memungkinkan analisis yang sangat mendalam dan detail, yang merupakan kekuatan dari pendekatan studi kasus. Kedua, analisis hanya dapat mengakses makna yang ada dalam teks dan dalam komentar, tidak langsung mengakses intensi produser atau interpretasi audiens melalui wawancara. Penelitian lanjutan dengan metode campuran yang melibatkan wawancara mendalam dengan produser dan audiens dapat memberikan informasi tambahan. Ketiga, resonansi audiens hanya diukur melalui komentar publik, yang mungkin tidak merepresentasikan keseluruhan audiens mengingat banyak pendengar yang pasif dan tidak berkomentar. Meskipun demikian, komentar yang tersedia memberikan informasi yang bernilai bagaimana *framing* diterima dan diadopsi oleh audiens yang aktif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis terhadap episode *podcast* Bocor Alus Politik berjudul “Kemarahan Publik terhadap Kekuasaan” mengungkapkan konstruksi *framing* yang sistematis dan koheren dalam merepresentasikan kemarahan publik terhadap DPR dan kekuasaan politik secara lebih luas. Berdasarkan model Entman, ditemukan empat elemen *framing* utama yang bekerja secara terintegrasi untuk membangun narasi komprehensif tentang kemarahan publik. Setiap elemen *framing* tidak berdiri sendiri tetapi saling memperkuat, menciptakan alur cerita yang menarik dan persuasif yang tidak hanya menginformasikan tetapi juga membentuk pemahaman dan sikap audiens terhadap isu.

### **Problem Definition: Arogansi Elite dan Pemutusan dari Aspirasi Rakyat**

Dalam dimensi *problem definition*, analisis menunjukkan bahwa *podcast* tidak

sekadar mendefinisikan masalah sebagai kenaikan tunjangan DPR secara teknis, tetapi membingkai masalah pada level yang lebih fundamental, yaitu arogansi dan sikap pongah elite politik yang terputus dari realitas dan aspirasi rakyat. Husein Abri Dongoran secara eksplisit menyatakan dalam *frame* ini:

“Sebetulnya ini demonstrasi atau kemarahan masyarakat itu akumulasi dengan tingkah pongahnya DPR.”

Penggunaan kata “pongah” (arogan) bukan sekadar deskripsi tetapi justifikasi yang menempatkan masalah pada dimensi moral dan karakter, bukan hanya pada dimensi kebijakan. *Framing* ini sangat kuat karena menyentuh emosi dan nilai-nilai keadilan, membuat isu tidak hanya tentang angka-angka rupiah tetapi tentang integritas dan representasi politik.

*Podcast* kemudian memperkuat *problem definition* dengan menyajikan data konkret yang mengilustrasikan ketimpangan ekstrem. Raymond Dusrikang menguraikan perhitungan detail:

“Jadi per tahun kalau misalkan dari dana reses dan kundapil saja, mereka bisa dapat 5,2 miliar... Kalau kita tambah dengan duit dana reses dan dana kundapil, artinya DPR setahun itu bisa dapat 7,9 miliar. Kalau kita bagi 12 atau bagi setahun, per bulan itu mereka bisa mengantongi Rp658 juta per bulan.”

Penyajian data ini tidak semata-mata berfungsi sebagai penyampaian informasi objektif, melainkan sebagai strategi framing yang mentransformasikan abstraksi angka-angka berskala besar menjadi representasi yang lebih konkret dan mudah dipahami oleh audiens. Angka Rp658 juta per bulan menjadi *anchor* yang kuat dalam memori audiens. Lebih lanjut, Raymond membuat perbandingan yang mengejutkan:

“Terus tadi *gue* bagi tuh, Rp658 juta dibagi UMR Jakarta. Berarti bisa bayar berapa buruh? Dia bisa membayar 120 orang.”

Perbandingan dengan upah buruh dapat dipahami sebagai *framing device* yang efektif

dalam memproduksi persepsi ketidakadilan. Jika dilakukan perbandingan, antara satu anggota DPR dan sekitar 120 buruh menciptakan kontras yang sulit diabaikan, sehingga ketimpangan tidak lagi dipahami sebagai angka statistik, melainkan sebagai kondisi yang memiliki muatan evaluatif dan moral

Ironi dalam sistem juga diekspos sebagai bagian dari *problem definition*. Husein menjelaskan bahwa tunjangan rumah diberikan meskipun rumah dinas sudah tersedia di kompleks Kalibata:

“Begitu melihat kompleks perumahan DPR itu, kondisinya sudah ibaratnya tidak terawat karena tidak dihuni lagi oleh para anggota DPR. Rumput-rumput sudah tinggi, sepi.”

Deskripsi visual mengenai rumah dinas yang kosong dan tidak terawat berfungsi sebagai metafora yang merepresentasikan keterputusan antara fasilitas yang disediakan oleh negara dan perilaku elite politik yang memilih untuk tidak memanfaatkannya, namun tetap mengajukan tuntutan atas tunjangan tambahan.

Daniel menambahkan temuan investigatif tentang apartemen yang disewa legislator:

“Dia *nyewa* kurang lebih sekitar 200 juta per tahun... Itu tanpa *maintenance*.”

Dengan tunjangan perumahan sebesar Rp600 juta per tahun dan pengeluaran sewa yang dilaporkan hanya sekitar Rp200 juta, terdapat selisih sebesar Rp400 juta yang secara implisit memunculkan pertanyaan mengenai alokasi dana tersebut. *Podcast* ini memang tidak secara eksplisit menarasikan adanya praktik korupsi, namun menyajikan informasi sedemikian rupa sehingga audiens diarahkan untuk membentuk interpretasi kritisnya sendiri. Hal ini menjadi sebuah strategi implikatur yang sering kali lebih efektif dibandingkan tuduhan yang disampaikan secara langsung.

### **Causal Interpretation: Sistem Oligarki dan Perilaku Elite Sistematis**

Dalam dimensi *causal interpretation*, *podcast* tidak menarasikan individu sebagai satu-satunya sumber permasalahan, melainkan



mengaitkan isu yang dibahas dengan struktur sistem oligarki serta budaya politik koruptif yang telah mengakar. Husein menjelaskan logika justifikasi kenaikan tunjangan:

“Ada teman politikus yang cerita bahwa kenapa sih tunjangan DPR ini dinaikkan... dengan harapan bahwa anggota DPR itu tidak *nyopet-nyopet* atau korupsi dari mata anggaran-mata anggaran di pemerintahan.”

Respons Raymond dapat dilihat sebagai kritik yang tajam terhadap rasionalitas kebijakan yang absurd, di mana pemberian tunjangan tinggi diposisikan sebagai solusi atas potensi korupsi yang mungkin terjadi. Dalam kerangka demokrasi modern, argumen ini problematis karena menggantikan tuntutan akan transparansi dan penegakan hukum dengan logika kompensasi material bagi elite politik. Framing yang dibangun menunjukkan bahwa persoalan yang diangkat tidak semata-mata berkaitan dengan kenaikan tunjangan, melainkan dengan pola pikir elite politik yang memandang privilese ekstrem sebagai sesuatu yang sah melalui justifikasi yang lemah secara rasional.

Podcast ini juga mengungkapkan bahwa mekanisme sistematis manipulasi anggaran yang menunjukkan bahwa korupsi bukan anomali individual tetapi bagian integral dari sistem. Husein menceritakan:

“Gue pernah *nulis* soal pengadaan dana Gorden DPR itu 46 miliar.”

Daniel menambahkan praktik pelaporan kunjungan dail yang dimanipulasi:

“Misalkan datang 1 titik, tapi bilangnya itu 6 titik.”

Narasi-narasi tersebut membangun sebuah *frame* yang memposisikan korupsi bukan sebagai penyimpangan perilaku oknum, melainkan sebagai modus operandi yang bersifat terstruktur dan sistemik. Dengan konstruksi semacam ini, problem korupsi didefinisikan sebagai persoalan institusional yang menuntut reformasi menyeluruh, tidak hanya sekadar rotasi personal. *Framing* ini berperan penting dikarenakan secara konseptual menggeser tanggung jawab dari

individu ke sistem, sehingga solusi yang diproyeksikan pun bersifat struktural dan kolektif, bukan personal.

Analisis kontinuitas masalah struktural juga penting dalam *causal interpretation*. Raymond menyoroiti akumulasi kebijakan kontroversial:

“Undang-undang kayak KUHAP yang kemarin kita bahas juga menimbulkan gejala di masyarakat dan lainnya termasuk itu waktu 17 Agustus hari kemerdekaan di DPR menjadi tempat jogetnya anggota DPR.”

*Framing* yang dibangun menunjukkan bahwa kemarahan publik tidak diposisikan sebagai reaksi terhadap satu peristiwa yang terisolasi, melainkan sebagai akumulasi dari rangkaian perilaku elite yang berulang dan sistematis. Konstruksi ini memperkuat argumen bahwa akar permasalahan terletak pada sistem politik yang memungkinkan terjadinya impunitas elite. Kontinuitas persoalan tersebut kemudian menstrukturkan narasi bahwa aksi demonstrasi dipahami sebagai respons yang hampir tidak terelakkan terhadap frustrasi kolektif yang terus terakumulasi.

### ***Moral Evaluation: Legitimasi Kemarahan sebagai Respons Demokratis***

Dalam dimensi *moral evaluation*, *podcast* ini secara tegas membingkai kemarahan publik sebagai respons yang sah dan diperlukan dalam kerangka demokrasi. Raymond menyatakan posisi Tempo:

“Demonstrasi yang menuntut pembubaran DPR itu sebagai ekspresi kekesalan dan kemarahan warga terhadap lembaga legislatif... Dalam sebuah republik, warga itu juga punya tugas, yakni mengkritik lembaga-lembaga yang tidak menjalankan perannya secara ideal.”

*Framing* yang dibangun memosisikan demonstrasi bukan sebagai gangguan terhadap ketertiban publik, melainkan sebagai bagian dari kewajiban sipil dalam sebuah republik yang demokratis dan sebagai bagian dari partisipasi politik masyarakat. Konstruksi ini memberikan legitimasi moral yang kuat

terhadap kemarahan publik dengan membingkainya sebagai ekspresi warga negara (*citizenship*) yang aktif dan bertanggung jawab

Podcast membingkai perilaku DPR sebagai pengkhianatan mandat rakyat. Raymond menegaskan:

“Kalau memang anda sebagai wakil rakyat, ya sudah itu hak anda yang anda terima, ya segitu. *Nggak* usah kemudian ikut *nyopet*, apalagi kemudian meminta catatan insentif atau tunjangan yang lebih *gede*.”

Penggunaan istilah “*nyopet*” untuk merujuk pada praktik korupsi oknum anggota DPR merupakan pilihan leksikal yang devaluatif. Istilah ini menyetarakan perilaku elite politik dengan kriminalitas jalanan, sehingga meruntuhkan aura legitimasi dan kehormatan simbolik yang umumnya dilekatkan pada institusi negara. Penyetaraan semacam ini berfungsi efektif dalam membangun delegitimasi moral terhadap DPR.

Evaluasi moral mencakup kritik ketidakkonsistenan elite dalam perbandingan internasional. Husein menunjukkan:

“Kalau kita bandingkan dengan negara lain, kita cukup besar ya. Bahkan di Norwegia mereka *nggak* ada tunjangan lain-lainnya. Kayaknya pejabat kita tuh kalau mencontohkan kayak harga beras di Jepang... mereka *nggak* mau membandingkan dirinya sendiri.”

Framing yang dibangun mengekspos standar ganda elite politik dalam penggunaan perbandingan yang bersifat selektif dan oportunistik, yakni hanya dilakukan ketika menguntungkan kepentingan mereka. Konstruksi ini memperkuat penilaian moral bahwa elite politik memprioritaskan kepentingan diri di atas kepentingan nasional. Daya resonansi kritik tersebut terletak pada kemampuannya menyingkap hipokrisi yang ditunjukkan secara konsisten dan mudah dikenali oleh audiens.

### **Treatment Recommendation: Pengawasan Publik dan Partisipasi Demokratis**

Pada dimensi *treatment recommendation*, podcast tidak secara literal menyerukan pembubaran DPR, dengan mengakui keterbatasan dan ketidakmungkinan konstitusional dari langkah tersebut, melainkan mendorong perlunya pengawasan publik yang berkelanjutan. Raymond menjelaskan:

“Pembubaran DPR itu secara politik dan konstitusional itu tidak mungkin. DPR itu masih sangat dibutuhkan oleh Prabowo untuk menstempel dan memberikan persetujuan terhadap program-program mercusuarinya.”

*Framing* yang dibangun mengedukasi audiens mengenai batasan-batasan politik dan konstitusional yang nyata dalam sistem demokrasi Indonesia. Dengan menegaskan peran DPR sebagai institusi yang masih krusial dalam proses legitimasi kebijakan eksekutif, framing ini menjaga sikap kritis audiens tanpa jatuh pada tuntutan yang tidak feasible secara politik. Dengan demikian, podcast menampilkan keseimbangan antara idealisme normatif dan realisme politik.

Secara implisit, podcast juga merekomendasikan secara implisit dengan menekankan pentingnya kewaspadaan publik yang berkelanjutan terhadap berbagai manuver politik. Daniel mengungkap:

“Manuver Dasko ini cuma hanya untuk meredam aksi massa. Sebenarnya nanti anggaran ini akan tetap ada, tapi mungkin dengan nomenklatur atau penamaan yang lain.”

*Framing* yang dibangun menumbuhkan sikap skeptisisme kritis terhadap janji-janji politik serta mendorong praktik pemantauan publik yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, podcast berfungsi sebagai bentuk pendidikan politik yang mendorong audiens untuk tidak berhenti pada konsesi simbolik, melainkan menuntut perubahan yang lebih substantif.

Podcast tersebut juga menegaskan demonstrasi sebagai instrumen demokratis yang sah dan perlu dilindungi. Raymond menyatakan:

“Demonstrasi itu adalah salah satu sarana untuk mengekspresikan

kekecewaan dan kemarahan itu dan dijamin konstitusi juga... jangan *ditangkep-tangkepin*.”

Seruan “jangan *ditangkep-tangkepin*” merupakan pesan politik yang dikonstruksikan menyoroti potensi praktik represif negara sekaligus menegaskan hak-hak konstitusional warga. Dalam kerangka ini, podcast menyampaikan seruan tindakan yang bersifat implisit namun efektif, dengan mendorong partisipasi kritis yang berkelanjutan sebagai bagian dari hak sekaligus kewajiban dalam demokrasi.

### Transformasi dari Ruang Digital ke Ruang Publik

Analisis komentar pendengar di Spotify dan YouTube menunjukkan resonansi kuat antara framing podcast dengan respons publik. Untuk membuktikan klaim resonansi ini secara empiris, berikut disajikan tabel komentar representatif yang dipilih berdasarkan kesesuaiannya dengan elemen-elemen framing yang diidentifikasi dalam episode podcast.

“@Faruqy: Kawal 17+8 #ResetIndonesia 🍌”

“@ashfaabid1897: Beras mahal, PHK dimana-mana, cari duit susah... Kalau anda sudah tidak lagi memberi ruang untuk koreksi, jangan salahkan rakyat yang marah dan turun ke jalan”

“@jarotwijayanto-b6o: Ini sebuah akumulasi kekecewaan dan kemarahan rakyat yang selama ini diam... ditambah adanya pejabat yang merasa girang sambil joget karena tunjangan yang cukup besar di tengah rakyat yang sedang susah di segala bidang.”

Analisis komentar pendengar di Spotify dan media sosial menunjukkan resonansi kuat antara *framing podcast* dengan respons publik. Komentar-komentar mengadopsi *frame* yang sama dengan podcast, menggunakan bahasa serupa dan referensi pada data yang sama. Beberapa pendengar menggunakan *hashtag* #ResetIndonesia, mengindikasikan adopsi narasi bahwa masalahnya sistemik dan memerlukan perubahan fundamental, bukan

sekadar reformasi inkremental. Komentar seperti “Kawal 17+8 #ResetIndonesia” menunjukkan dukungan untuk terus memperjuangkan isu, selaras dengan rekomendasi podcast untuk *vigilance* berkelanjutan. Resonansi ini menunjukkan bahwa podcast berhasil tidak hanya menginformasikan tetapi juga memobilisasi, mentransformasi konsumsi media pasif menjadi partisipasi politik aktif.

Podcast menganalisis adanya keanehan demonstrasi 25 Agustus 2025 yang tidak melibatkan BEM dan koalisi masyarakat sipil seperti biasa. Daniel menjelaskan temuan dari komunitas Bareng Warga:

“Mereka tidak ada koordinasi dengan teman-teman yang turun tanggal 25. Jadi mereka sifatnya hanya memantau.”

Husein menambahkan analisis dari Drone Imprit tentang kegagalan pola media sosial:

“Akun-akun yang anti-demokrasi sama anti-demonstrasi... tiba-tiba mereka itu mendorong atau menyebar luas supaya ikut aksi demonstrasi tanggal 25 Agustus.”

*Framing* ini menambah kompleksitas pada narasi yang dibangun dengan menunjukkan bahwa realitas politik bersifat tidak linear dan menuntut kapasitas berpikir kritis. Podcast tidak mengambil posisi definitif mengenai aktor di balik kemungkinan orkestrasi, melainkan menyajikan beragam kemungkinan interpretatif yang mendorong audiens untuk melakukan penalaran kritis secara mandiri

### Podcast sebagai *Counter-Public Sphere*

Temuan penelitian ini mendukung konsep *counter-public sphere* yang dikemukakan Fraser (1990) dan *networked public sphere* dari Benkler (2006). *Podcast Bocor Alus Politik* berfungsi sebagai ruang alternatif yang menawarkan framing berbeda dari media mainstream. Sementara media mainstream cenderung fokus pada aspek teknis kebijakan dan perdebatan politik formal, podcast menggali dimensi moral dan struktural dari masalah, mengungkap mekanisme kekuasaan tersembunyi, dan memberikan

konteks historis lebih dalam. Perbedaan ini penting dalam memperkaya diskursus publik dan memberikan alternatif bagi audiens yang mencari perspektif kritis.

Karakteristik *podcast* sebagai medium audio dengan format percakapan memungkinkan kedalaman analisis yang relatif sulit dicapai oleh media lain. Durasi episode yang mencapai sekitar 32 menit menyediakan ruang temporal yang memadai untuk eksplorasi isu secara mendalam, mulai dari penyajian data investigatif, analisis konteks politik, hingga diskusi mengenai implikasi normatif dan praktis. Format percakapan yang melibatkan tiga *host* menciptakan dinamika interaksi yang memungkinkan hadirnya beragam perspektif secara organik dan dialogis. Berbeda dengan artikel berita yang umumnya bersifat satu arah atau unggahan media sosial seperti Twitter yang dibatasi oleh jumlah karakter, *podcast* memfasilitasi proses pemaknaan yang lebih reflektif dan berlapis.

Selain itu, karakteristik audial dan dialogis *podcast* berkontribusi pada pembentukan rasa kedekatan (*intimacy*) antara *host* dan audiens. Kedekatan ini tidak hanya bersifat emosional, tetapi juga kognitif, karena pendengar diundang untuk mengikuti alur penalaran, perbedaan pendapat, dan proses argumentatif yang berlangsung secara terbuka dalam percakapan. Dengan demikian, audiens diposisikan bukan sebagai penerima informasi yang pasif, melainkan sebagai partisipan simbolik dalam diskusi publik.

Kombinasi antara kedalaman analisis, format dialogis, dan kedekatan emosional tersebut menciptakan kondisi yang kondusif bagi pembelajaran politik informal, di mana pengetahuan politik diperoleh melalui proses deliberatif yang bersifat reflektif. Lebih jauh, keterlibatan afektif dan kognitif ini meningkatkan potensi mobilisasi partisipasi publik, karena audiens tidak hanya memahami isu secara rasional, tetapi juga merasa terikat secara normatif dan emosional terhadap persoalan yang dibahas.

### **Politik Representasi dan *Power Relations***

Dalam perspektif representasi Hall (1997), *podcast* ini menunjukkan bagaimana

makna “kemarahan publik” tidak hadir secara alamiah, melainkan dikonstruksi melalui praktik representasional berupa bahasa, narasi, dan strategi diskursif tertentu. Kemarahan tidak direpresentasikan sebagai luapan emosi spontan yang irasional, tetapi diposisikan sebagai respons rasional terhadap ketidakadilan struktural yang dialami secara kolektif, serta dilegitimasi baik secara moral maupun konstitusional. (Hall dkk., 2025)

Konstruksi makna ini menjadi sangat berpengaruh karena dalam wacana politik arus utama, kemarahan publik kerap dibingkai sebagai ancaman terhadap stabilitas, bentuk irasionalitas massa, atau bahkan direduksi sebagai manifestasi dari “politik identitas” yang dianggap perlu dikendalikan atau diredam. *Podcast* ini secara aktif membalik logika representasional tersebut dengan membingkai kemarahan sebagai bentuk kesadaran politik yang sah dan diperlukan dalam demokrasi, khususnya sebagai mekanisme dalam melakukan artikulasi atas ketidakpuasan dan kontrol terhadap kekuasaan.

Sejalan dengan argumen (Kartika, 2022) dalam (Amal dkk., 2025) bahwa makna diproduksi melalui proses representasi di mana konsep-konsep dalam pikiran dieksternalisasi melalui bahasa, *podcast* ini mengeksternalisasi kemarahan publik sebagai sebuah *virtue* demokratis, bukan sebagai *vice* sosial. Dengan demikian, kemarahan tidak hanya dipahami sebagai ekspresi emosional, tetapi sebagai praktik kewargaan yang memiliki nilai normatif dan fungsi politik dalam menjaga akuntabilitas demokratis.

### **KESIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa *podcast* Bocor Alus Politik memainkan peran penting dalam merepresentasikan kemarahan publik terhadap kekuasaan serta mentransformasikan wacana dari ruang digital ke ruang publik yang lebih luas. Melalui analisis framing Robert Entman, penelitian ini menemukan bahwa kemarahan publik dikonstruksi secara koheren melalui definisi masalah yang menyoroti keterputusan elite dari rakyat, penjelasan kausal yang mengaitkan persoalan dengan struktur oligarki politik,

legitimasi moral atas kemarahan sebagai emosi demokratis, serta rekomendasi tindakan yang menekankan pentingnya pengawasan publik dan perlindungan hak berdemonstrasi.

Temuan ini menegaskan bahwa Bocor Alus Politik berfungsi sebagai *counter-public sphere* yang menawarkan narasi alternatif di luar wacana media arus utama. Karakteristik medium podcast, seperti format percakapan yang intim, durasi panjang, dan kredibilitas institusional Tempo, menciptakan ruang diskursif yang memungkinkan artikulasi kritik politik secara mendalam dan beresonansi dengan audiens. Resonansi tersebut tercermin dari adopsi narasi dan bahasa *podcast* oleh audiens, yang menunjukkan bahwa representasi kemarahan di ruang digital berpotensi membentuk kesadaran politik dan mendorong mobilisasi kolektif. Namun demikian, temuan ini juga menegaskan pentingnya kewaspadaan kritis terhadap dinamika ruang digital, terutama terkait potensi manipulasi dan orkestrasi wacana dalam konteks kontestasi politik.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian *public sphere* di era digital dengan menegaskan peran podcast sebagai medium yang tidak hanya menyebarkan informasi, tetapi juga aktif mengonstruksi makna politik dan emosi kolektif. Temuan ini memperkuat konsep *networked public sphere* dan *counter-public sphere*, sekaligus memperkaya pemahaman tentang *framing* sebagai mekanisme ideologis dalam produksi wacana politik. Dalam perspektif *digital public sphere* menurut Papacharissi (2002; 2010), podcast ini tidak sekadar berfungsi sebagai media penyampai informasi, melainkan juga menjadi ruang diskursif yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam membentuk opini publik sekaligus melakukan kontrol terhadap kekuasaan. Secara praktis, penelitian ini menyoroti pentingnya independensi, kedalaman analisis, dan literasi media dalam ekosistem podcast politik bagi produsen konten, audiens, dan pembuat kebijakan.

Dengan keterbatasan pada fokus analisis satu episode dan pendekatan berbasis teks, penelitian ini membuka peluang bagi riset lanjutan yang lebih komparatif, eksperimental, dan etnografis. Secara keseluruhan, penelitian

ini menegaskan bahwa podcast telah menjadi aktor signifikan dalam demokrasi Indonesia kontemporer sebagai ruang artikulasi emosi politik, sarana kritik terhadap kekuasaan, dan arena deliberasi publik yang relevan dalam proses konsolidasi demokrasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amal, M. I., Kartika, Muh. M. P., & Subagio, E. K. S. (2025). Journalistic Language as a Framing Tool: Analysis of Immanuel Ebenezer's Reports on Kompas.com and Tempo.co. *Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*, 10(4), 1246–1263. <https://akrabjuara.com/index.php/akrabjuara/article/view/2594>
- Amal, M. I., Mursalim, M., & Karnay, S. (2024). Indonesian Criminal Code Draft (RKUHP) Objectivity on Tirto.id. *Representamen*, 10(02), 1–15. <https://doi.org/10.30996/representamen.v10i02.10617>
- Angelica, V. (2025, September 30). *Revolusi Konten Digital Melalui Fenomena Podcast*. Binus University. <https://binus.ac.id/malang/public-relations/2025/09/30/revolusi-konten-digital-melalui-fenomena-podcast/>
- Annur, C. M. (2024, Februari 22). *Indonesia Masuk Daftar 10 Negara Paling Sering Mendengar Podcast*. Databoks Katadata. <https://databoks.katadata.co.id/teknologi-telekomunikasi/statistik/a4344978a28ac8c/indonesia-masuk-daftar-10-negara-paling-sering-mendengar-podcast>
- Benkler, Y. (2006). *Wealth of Networks: How Social Production Transforms Markets and Freedom*. Yale University Press.
- Castells, M. (2015). *Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age* (2 ed.). Polity Press.
- Entman, R. M. (1993). Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. *Journal of Communication*, 43(4), 51–58. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x>
- Eriyanto. (2018). *Media dan Opini Publik: Bagaimana Media Menciptakan Isu (Agenda Setting), Melakukan Pembingkai (Framing), dan Mengarahkan Pandangan Publik (Priming)*. Rajawali Pers.
- Fraser, N. (1990). Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of Actually Existing Democracy. *Social Text*, (25/26), 56. <https://doi.org/10.2307/466240>

- Habermas, J. (1989). *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society*. MIT Press.
- Hall, S. (1997). *Representation: Cultural Representations and Signifying Practices*. Sage Publications Ltd.
- Hall, S., Nixon, S., & Evans, J. (2025). *Representation: Cultural Representations and Signifying Practices* (3 ed.). Sage.
- Kartika, M. M. P., & Rahardjo, T. (2021). Kecenderungan agenda pemberitaan Tribun Timur terkait isu budaya uang panai. *Kareba: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 10(2), 102–113. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/kareba/article/view/18493>
- Kartika, Muh. M. P. (2022). *Konstruksi pemberitaan uang panai” di media daring: Analisis framing budaya uang panai” pada portal berita Tribun Timur* [Tesis Magister]. Universitas Diponegoro.
- Lecheler, S., & de Vreese, C. H. (2018). *News Framing Effects*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315208077>
- Littlejohn, S. W., Foss, K. A., & Oetzel, J. G. (2017). *Theories of Human Communication* (11 ed.). Waveland Press, Inc.
- McCombs, M. E., & Valenzuela, S. (2021). *Setting the agenda: the news media and public opinion* (3 ed.). Polity Press.
- Mietzner, M. (2020). Populist Anti-Scientism, Religious Polarisation, and Institutionalised Corruption: How Indonesia’s Democratic Decline Shaped Its COVID-19 Response. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 39(2), 227–249. <https://doi.org/10.1177/1868103420935561>
- Muhamad, N. (2024, November 20). *Indonesia, Negara Paling Sering Dengar Podcast di Dunia pada Oktober 2024*. Databoks Katadata. <https://databoks.katadata.co.id/teknologi-telekomunikasi/statistik/673d67d15cff2/indonesia-negara-paling-sering-dengar-podcast-di-dunia-pada-oktober-2024>
- Newman, N., Fletcher, R., Schulz, A., Andi, S., Ribertson, C. T., & Nielsen, R. K. (2021). *Reuters Institute Digital News Report 2021*. [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=3873260](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3873260)
- Nussbaum, M. C. (2016). *Anger and forgiveness: resentment, generosity, justice*. Oxford University Press.
- Papacharissi, Z. (2002). The virtual sphere: The internet as a public sphere. *New Media & Society*, 4(1), 9–27. <https://doi.org/10.1177/14614440222226244>
- Papacharissi, Z. (2010). *A Private Sphere: Democracy in a Digital Age*. Wiley.
- Prior, M. (2019). *Hooked: how politics captures people’s interest*. Cambridge University Press.
- Swart, J., Peters, C., & Broersma, M. (2019). Sharing and Discussing News in Private Social Media Groups: The social function of news and current affairs in location-based, work-oriented and leisure-focused communities. *Digital Journalism*, 7(2), 187–205. <https://doi.org/10.1080/21670811.2018.1465351>
- Tandoc, E. C., Lim, D., & Ling, R. (2020). Diffusion of disinformation: How social media users respond to fake news and why. *Journalism*, 21(3), 381–398. <https://doi.org/10.1177/1464884919868325>